

TAJUK RENCANA...

Parpol Perlu Introspeksi

LANGKAH Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama yang biasa dipanggil Ahok memilih maju ke Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen mendapat reaksi beragam dari berbagai pihak. Ada yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang kontra, mereka menilai Ahok telah melakukan deparpolisasi atau menyingkirkan parpol. Namun, tidak sedikit yang mendukung langkah Ahok memilih jalur independen sebagai bentuk atau upaya pembelajaran bagi partai politik (parpol) agar melakukan introspeksi diri.

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad 'Buya' Syafiq Maarif, misalnya, mendukung munculnya pemimpin daerah dari jalur independen sebagai bentuk pembelajaran dan introspeksi bagi partai politik (parpol). "Parpol harus introspeksi diri sendiri kenapa rakyat lebih memilih yang independen, bukan dari calon partai," tanya Buya dalam sebuah acara di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) (Harian Bernas, 18/3).

Menurut Buya, selama ini makin marak praktik politik transaksional di parpol. Persoalan itu bisa menjadi bumerang bagi parpol yang berperan sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Politik transaksional jadi penyakit demokrasi kita saat ini. Karena itu, parpol perlu menjalankan tugas dengan baik dengan memberikan pendidikan politik bagi para anggota agar mereka dapat menjadi wakil rakyat yang baik.

Kita menggarisbawahi apa yang disampaikan Buya. Parpol perlu mengoreksi diri apakah langkah mereka selama ini sudah sesuai kehendak rakyat atau justru sebaliknya. Dalam hal pencalonan kepala daerah atau anggota legislatif, tak jarang para calon dibebankan untuk membayar sejumlah uang kepada parpol agar bisa menjadi calon, baik menjadi kepala daerah maupun menjadi anggota legislatif. Uang yang disetor para calon ke parpol konon bisa mencapai miliaran rupiah. Padahal baru tahap menjadi calon dan belum tentu terpilih. Bagi calon yang kemudian tidak terpilih akan gigit jari karena sudah kehilangan uang miliaran rupiah, baik dari kantong sendiri maupun hasil pinjaman atau menjual harta benda. Bahkan ada calon yang gagal terpilih menjadi miskin bahkan jadi gila.

Sementara bagi calon yang terpilih "wajib" mengembalikan modal dan menyetor ke partai secara rutin tiap bulan. Tentu ini sangat membebani para calon, baik yang terpilih apalagi yang tidak terpilih. Dengan adanya transaksi politik seperti ini maka tak heran mereka yang punya uang dengan mudah menjadi calon anggota legislatif maupun kepala daerah tanpa harus melalui proses pengkaderan di partai. Siapa pun yang punya uang dengan mudah bisa mendaftar menjadi caleg atau kepala daerah dari partai tertentu tanpa harus menjadi pengurus partai sebelumnya. Akibatnya, tak jarang kualitas kader yang terpilih sangat jauh dari harapan masyarakat. Sementara kader yang sudah lama aktif di partai dan memiliki kualitas memadai tapi tak punya uang akan sulit menjadi caleg atau kepala daerah. Apalagi kader di luar partai yang punya kualitas memimpin tapi tak punya yang akan lebih sulit lagi untuk dicalonkan. Kalau pun bisa tapi harus membayar sejumlah uang yang jumlahnya kadang-kadang sulit dinalar.

Inilah yang memicu kader berkualitas di luar parpol untuk memilih jalur independen. Selain karena tak punya uang, calon independen sulit mendapat kesempatan untuk menjadi calon karena bukan kader partai. Maka dipilahlah jalan independen tanpa harus melalui parpol.

Parpol mestinya tak perlu menyalahkan calon independen. Justru sebaliknya parpol berterima kasih kepada calon independen karena telah memberi pelajaran bagi parpol dan pendidikan politik bagi masyarakat demi meningkatkan kualitas demokrasi. Apalagi jalur independen diatur dalam UU sehingga langkah tersebut sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Bukan malah menuduh calon independen melakukan deparpolisasi atau melanggar undang-undang.

Yang perlu dilakukan parpol ke depan adalah mendengar aspirasi masyarakat, bukan aspirasi pengurus partai apalagi aspirasi ketua partai. Karena partai merupakan alat pengemban aspirasi masyarakat maka harus mendengar dan mengikuti kehendak masyarakat. Kalau masyarakat menghendaki A maka partai jangan melakukan B atau sebaliknya. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Mengabaikan suara rakyat berarti langkah bunuh diri bagi partai. Pengurus parpol harus belajar dari pengalaman parpol-parpol yang lama-lama ditinggal pendukungnya karena mengabaikan suara rakyat.

Dalam kasus Ahok, parpol semestinya berterima kasih karena Ahok telah memberikan pendidikan politik bagi rakyat dan bagi parpol itu sendiri. Rakyat dan parpol harus mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pengurus apalagi ketua umum partai. Dan partai bukan komoditas ekonomi yang bisa dipinjamkan, tapi menjadi alat untuk memperjuangkan ke-